

## Kemanusiaan dan Eksploitasi: Analisis Kebijakan Daendels di Tanah Jawa (1808-1811)

Rosmaida Sinaga<sup>1</sup> Dian Pratama<sup>2</sup> Putri Hasanah Piliang<sup>3</sup> Dewy Maulidya Ningrum<sup>4</sup>  
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [rosmaidasinaga@unimed.ac.id](mailto:rosmaidasinaga@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [dianpratama0531@gmail.com](mailto:dianpratama0531@gmail.com)<sup>2</sup>  
[piliangputrihsnh@gmail.com](mailto:piliangputrihsnh@gmail.com)<sup>3</sup> [dewymaulidyaningrum@gmail.com](mailto:dewymaulidyaningrum@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh H.W Daendels selama masa pemerintahannya di Hindia Belanda, Khususnya di tanah Jawa, dari perspektif kemanusiaan dan eksploitasi. Daendels, yang dikenal sebagai gubernur jendral Hindia Belanda antara tahun 1808-1811, menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan militer dan infrastruktur di Jawa, seperti Pembangunan jalan raya pos. Meskipun kebijakan ini membawa modernisasi dan efisiensi administratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini membahas sisi gelap dari implementasinya, yakni eksploitasi tenaga kerja pribumi yang melibatkan kerja paksa (Rodi), penderitaan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan Daendels, meskipun berorientasi pada Pembangunan, menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang signifikan, serta memberikan refleksi kritis terhadap konsep Pembangunan masa colonial yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Daendels, Kerja Paksa, Hak Asasi Manusia, Modernisasi Dan Eksploitasi

### Abstract

*Policies implemented by H.W Daendels during his reign in the Dutch East Indies, especially in Java, from the perspective of humanity and exploitation. Daendels, known as the governor-general of the Dutch East Indies between 1808-1811, implemented various policies aimed at strengthening military defense and infrastructure in Java, such as the construction of postal highways. Although this policy brought modernization and administrative efficiency. The method used in this study is the historical research method with four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. This study discusses the dark side of its implementation, namely the exploitation of indigenous labor involving forced labor (Rodi), suffering, and violations of Human Rights. This study aims to describe how Daendels' policies, although oriented towards Development, have significant humanitarian consequences, and provide critical reflections on the concept of colonial Development that sacrifices human values.*

**Keywords:** Daendels' Policy, Forced Labor, Human Rights, Modernization and Exploitation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Daendels menerima berbagai instruksi sebelum berlayar ke Jawa, yang merupakan negara asing baginya karena belum pernah mengunjunginya sebelumnya. Atas perintah Napoleon Bonaparte, pada tanggal 28 februari 1807, Louis Napoleon langsung memberikan Daendels posisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Persiapan selesai, dan pada 9 Februari 1807, Louis Napoleon menandatangani arahan yang harus diikuti oleh Daendels. (Raharjo, 2024) Instruksi yang diberikan kepada Gubernur Jenderal Koloni dan Wilayah Asia terdiri dari 37 Pasal, serta 6 Pasal yang mengatur pembubaran dan pembentukan Pemerintah Tinggi Batavia yang baru. Daendels akhirnya dinaikkan pangkatnya dari Kolonel Jenderal menjadi Marsyal oleh Louis Napoleon karena beratnya tugas yang ditanggungnya. Diharapkan bahwa Daendels akan

melakukan apa yang sudah digariskan dalam instruksi raja Louis Napoleon kepadanya. Daendels berlayar menuju Jawa pada bulan Maret 1807 secara rahasia agar tidak diketahui Inggris. Ini penting untuk diingat karena Inggris memblokir hampir semua lautan sebagai balasan terhadap Perancis, yang menerapkan Politik Kontinental, yang membatasi daratan Eropa. Daendels tiba di Anyer Banten di Jawa pada tanggal 1 Januari 1808. Perjalanan dari Eropa ke Jawa memakan waktu total sepuluh bulan. (Raharjo, 2024) Setibanya di Jawa daendels dihadapkan dengan situasi yang dimana bahwa sistem pemerintahan di Jawa tidak efisien dan penuh dengan korupsi. Infrastruktur militer juga sangat lemah, sehingga Jawa berada dalam keadaan yang hampir tidak bisa dipertahankan jika Inggris benar-benar menyerang. Daendels langsung melakukan reformasi besar-besaran. Salah satu langkah pertamanya adalah memusatkan kekuasaan di tangan Gubernur Jenderal, menghapuskan jabatan-jabatan perantara yang dianggap tidak perlu, dan memulai pembangunan infrastruktur militer yang lebih kuat. Kebijakan-kebijakan ini menandai awal dari pendekatan Daendels yang keras dan tanpa kompromi dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jenderal. (Sinaga, Simangunsong, & Syafirah, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman, 2011). Studi literature review menjadi bagian yang penting dalam mengupas permasalahan. Pertama, heuristik (mengumpulkan sumber), sumber tertulis menjadi fokus pada kajian ini. Terutama kajian terdahulu seperti; Achsani, F. (2020)., Aman. (2014), Rosmaida Sinaga (2020). Inilah menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Kedua, Kritik. Sumber sejarah yang telah diperoleh seyogyanya dicroscek kebenarannya, dengan mempertimbangan fakta yang diutarakan. Ketiga, interpretasi, pada bagian ini fakta sejarah dideskripsikan, dinarasikan, dan dianalisis. Peneliti menjelaskan (eksplanasi) dengan dua cara yaitu mencipta ulang (re-create) dan menafsirkan (interpret). Data yang telah didapatkan direkonstruksi ulang hingga ditemukan kebaruan dan narasi sejarah sesuai dengan faktanya. Keempat. Historiografi, pada bagian ini, dikumpulkan semua interpretasi lalu disajikan dalam bentuk narasi analisis. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1)Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan (Kuntowijoyo, 2005).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Daendels di Hindia Belanda**

Raja Belanda Louis Bonaparte mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal, yang menandai awal transformasi Hindia Belanda. Pada awal tahun 1808, Daendels tiba di Jawa dengan kapal Amerika yang berhasil menghentikan blokade Inggris. Ia tampaknya seorang Jacobin dan sangat mengagumi Napoleon sampai mengibarkan bendera Perancis di Batavia ketika Belanda bergabung dengan Kekaisaran Perancis. Lombard. (2008) Pada 21 Oktober 1762, di Hattem, Belanda, lahir Herman Willem Daendels. Ia adalah anak dari seorang hakim kota di Gederland, provinsi Belanda. Saat itu, Raja Willem V dari Dinasti Oranje memerintah Belanda. Keluarga Daendels terdiri dari Burchard Johan Daendels dan Josina Christina van Tulleken. Hanya empat dari ketiga belas bersaudara lelaki-perempuan Daendels yang bertumbuh dewasa. Setelah menyelesaikan sekolah di Hattem pada tahun 1781, Daendels pergi ke Haderwijk untuk kuliah hukum. Dia direncanakan untuk menggantikan ayahnya sebagai hakim kota Hattem. Ia bersinggungan dengan filsafat modern dan konsep ketatanegaraan di sini. Menurut Nugroho (2015), gagasan dan gerakan patriotisme yang dipromosikan oleh Daendels menarik perhatian selama kuliahnya. Saat itu, kaum patriot

Belanda bersemangat untuk mengubah sistem ketatanegaraan tengah. Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Haderwijk dengan tugas akhir "De Compensation" (tentang kompensasi) dengan promotor P.A. Roscam, Daendels muda kembali ke kampung halamannya untuk memberi tahu teman-temannya tentang patriotisme. Menurut Toer (2005), Daendels terlibat dalam politik lokal di Hattem dengan kendaraannya, Exercitiegenootschap (perkumpulan untuk latihan). Kebetulan, akibat revolusi Perancis, gerakan mempersenjatai rakyat di Belanda sedang berlangsung. Puluhan korps dan perkumpulan latihan bebas dibentuk. Ketika Burchard Johan Daendels meninggal pada bulan Juli 1785, gerakan itulah yang dikenal sebagai kaum Patriot.

Untuk menggantikan ayahnya sebagai hakim kota. Namun, Willem V, raja Belanda saat itu, menolak Daendels untuk menjadi hakim kota karena dia adalah seorang patriot yang mungkin membahayakannya. Willem V mengangkat seorang Oranje yang setia kepada kerajaan. Ketidaksetujuan terhadap rezim Raja Willem V dari dinasti Oranje meningkat saat cita-cita Daendels menjadi hakim kota gagal. Selain itu, pemberontakan terjadi di Hattem dan Amsterdam. Daendels dan Patriot berhasil menghancurkan pasukan Oranje pada 9 Mei 1787. Sebagai tanggapan, pasukan kerajaan menurunkan kavaleri, artileri, dan dua resimen infanteri (Toer, 2005). Daendels melarikan diri ke kota Dunkerque di Perancis untuk menghadapi pasukan sekuat itu. Nasib Daendels akhirnya berubah menjadi seorang jenderal yang hebat dan terhormat berkat kehidupannya di Perancis. Ia mendirikan firma "Daendels, Gelderman & Co" bersama sudaranya Egbert Anthony dan rekan seperjuangannya Jan Gelderman pada tahun 1791. Melalui firma ini, ia melakukan transaksi senjata dengan pemerintah Perancis dan menjalin kontak dengan Menteri Dalam Negeri Perancis Dumouriez, yang memungkinkannya lebih dekat dengan para revolusioner di Paris. Daendels memerintah Jawa selama waktu yang cukup singkat, dari 14 Januari 1808 hingga 16 Mei 1811, selama 3 tahun 4 bulan, dengan cara yang fenomenal dan revolusioner. Menurut Vlekke (2016), Daendels tampaknya cocok tinggal di Batavia yang kotor dan kotor, meskipun dia belum pernah tinggal di timur sebelumnya. Daendels adalah orang baru yang tegas dan tahu apa yang dia inginkan. Pada hari-hari patriot, seorang orator revolusioner berkembang menjadi perwira diktator yang mirip dengan Napoleon. Kemudian kebijakan itu diterapkan di berbagai bidang, seperti reformasi birokrasi dan memberantas korupsi, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya pos Daendels, pembangunan benteng dan pertahanan militer, dan reformasi hukum dan peradilan di Jawa. Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas restu Napoleon Bonaparte. Karena dianggap kejam dan tanpa kompromi, dia sering digambarkan sebagai tokoh antagonis dalam sejarah Indonesia. Tetapi di balik kepribadiannya, ia membangun Jawa yang luar biasa. Dengan kekuasaan yang relatif singkat (dari 14 Januari 1808 hingga 16 Mei 1811), Daendels berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan Napoleon. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Daendels termasuk mengubah birokrasi dan memberantas korupsi, membangun benteng pertahanan militer, membangun Jalan Raya Pos yang panjangnya 1100 km, dan mereformasi sistem hukum dan peradilan di Jawa.

### **Eksplorasi Manusia Pada Zaman Daendels**

1. Kerja Rodi. Kerja rodi, atau kerja paksa, merupakan praktik yang sangat umum terjadi pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-19, Herman Willem Daendels, yang diangkat sebagai gubernur oleh Louis Napoleon, memperkenalkan sistem ini untuk mendukung proyek-proyek besar pemerintah kolonial. Daendels menggunakan kerja rodi sebagai metode utama untuk membangun jalan raya pos, yang membentang dari Anyer di pantai barat Pulau Jawa hingga Panarukan di pantai timur, sepanjang sekitar 1.100 kilometer. Sistem ini melibatkan pemaksaan penduduk pribumi untuk bekerja tanpa dibayar dengan

layak, sering kali dalam kondisi yang sangat buruk. Tujuan utama Daendels dalam menerapkan kerja rodi adalah untuk memperkuat infrastruktur militer dan ekonomi Belanda di Hindia Timur. Pertama, Daendels ingin membangun pabrik persenjataan di Surabaya dan Semarang, yang penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan kolonial. Kedua, pembangunan jalan raya pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan adalah untuk mempermudah transportasi barang dan pasukan di seluruh Pulau Jawa. Selain itu, Daendels juga membangun pangkalan armada di Ujung Kulon dan Anyer, serta benteng pertahanan dan pelabuhan untuk mendukung kegiatan militer.

Untuk mencapai tujuan ini, Daendels memaksa rakyat pribumi tidak hanya bekerja dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan hasil pertanian. Mereka diwajibkan untuk menjual hasil bumi mereka kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah. Selain itu, Daendels menerapkan sistem preanger, di mana rakyat Priangan diwajibkan menanam kopi untuk dikumpulkan oleh pemerintah. Semua langkah ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melawan Inggris dan mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman luar. Selama penerapan kerja rodi, kehidupan rakyat menjadi sangat menderita. Mereka dipaksa bekerja tanpa imbalan yang cukup dan sering kali dihadapkan pada kondisi kerja yang sangat keras. Ketika pekerja paksa berhenti bekerja, mereka sering kali diperlakukan dengan buruk. Proyek pembangunan jalan raya pos, misalnya, mengakibatkan kematian hingga 12.000 orang karena kondisi kerja yang sangat berat. Keadaan ini menunjukkan betapa kerasnya eksploitasinya terhadap penduduk pribumi demi memenuhi ambisi kolonial Belanda pada masa itu.

2. Perampasan Tanah. Pada masa pemerintahan kolonial Daendels di Indonesia, kebijakan perampasan tanah menyebabkan hilangnya hak kepemilikan tanah bagi penduduk lokal, khususnya di Jawa. Kebijakan ini melibatkan eksploitasi besar-besaran tanah oleh penguasa kolonial, yang mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan ekonomi yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Sistem tanam paksa, yang diterapkan selama masa tersebut, memaksa petani untuk bekerja di ladang yang ditanami tanaman ekspor, sering kali dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Para pemimpin tradisional dan penguasa kolonial memanfaatkan sistem ini untuk kepentingan mereka sendiri, sementara rakyat biasa menjadi korban dari eksploitasi ganda, baik dari pihak kolonial maupun dari pemimpin lokal yang diberi wewenang. Sementara sistem tanam paksa juga diterapkan di luar Jawa, dampaknya tidak seburuk di pulau tersebut. Di luar Jawa, tanam paksa biasanya dilakukan di tanah yang kurang produktif atau tidak digarap, sementara di Jawa, tanah yang subur dan telah dihuni penduduknya menjadi sasaran utama. Hal ini menyebabkan penduduk kehilangan tanah mereka dan harus bekerja di lahan yang ditanami tanaman ekspor dengan upah yang sering kali tidak layak atau bahkan tanpa bayaran sama sekali. Penindasan ini memperburuk keadaan ekonomi rakyat dan menggambarkan ketidakadilan dalam sistem kolonial yang diberlakukan pada masa itu.
3. Sosial dan Ekonomi. Antoine Laurent de Jussieu Daendels, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-19, menerapkan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung upaya perang Perancis melawan Inggris dengan cara mengeksploitasi sumber daya di tanah jajahan. Di bawah kepemimpinan Daendels, penduduk asli diwajibkan untuk menyerahkan hasil pertanian mereka kepada pemerintah kolonial tanpa imbalan yang memadai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial agar dapat mendanai perang, namun seringkali menyebabkan kesulitan besar bagi rakyat lokal. Selain itu, Daendels juga menjual tanah

kepada pihak swasta untuk mendapatkan dana tambahan. Langkah ini, meskipun memperkaya kas kolonial, berdampak negatif pada masyarakat lokal yang kehilangan akses ke tanah mereka. Daendels juga memfokuskan upayanya pada pengembangan produk-produk yang dapat dijual di pasar global, dengan harapan meningkatkan pendapatan kolonial dari ekspor. Namun, kebijakan ini sering kali memaksa petani untuk menanam komoditas tertentu dan mengabaikan kebutuhan lokal mereka. Di samping itu, Daendels memungut pajak yang tinggi dari penduduk asli, menambah beban ekonomi yang sudah berat bagi mereka. Di sisi lain, Daendels juga mengintegrasikan wilayah-wilayah kasultanan dan kasunanan ke dalam kekuasaan kolonial, memperluas pengaruh Belanda di Indonesia. Meskipun beberapa kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan ekonomi kolonial, praktik-praktik seperti pemaksaan pajak dan penjualan tanah kepada pihak swasta seringkali membuat Daendels dikenal sebagai seorang tiran. Meskipun pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukuman berat terhadap pejabat korup, tindakan Daendels tetap meninggalkan jejak ketidakadilan dan eksploitasi yang mendalam di masyarakat.

### **Kekejaman Kebijakan Daendels yang Merenggut Banyak Nyawa**

Pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels meluncurkan proyek besar untuk membangun jalan dan pelabuhan yang menghubungkan Anyer dengan Panarukan, dengan tujuan mempercepat perjalanan dari lebih dari satu bulan menjadi hanya delapan hari. Untuk mewujudkan megaprojek ini, ribuan pekerja, baik dari kalangan pribumi maupun Eropa, dipekerjakan. Namun, kondisi kerja yang sangat buruk di rawa-rawa menyebabkan banyak pekerja meninggal dunia. Penyakit malaria menyebar dengan cepat, dan proyek ini dikenal sangat mematikan, hingga Velderhof menyebutnya sebagai "Kuburan Belanda" pada tahun 1901. Jumlah korban jiwa sangat tinggi, dan menurut catatan Duinen pada tahun 1918, ribuan orang kehilangan nyawa akibat malaria yang menyebar di area tersebut. Ketika Sultan Banten menolak untuk mengirimkan pekerja baru karena mempertimbangkan kemanusiaan dan akibat kematian yang tinggi sebelumnya, Daendels menolak alasan tersebut dan mengirim utusan kembali dengan tuntutan yang sangat berat. Utusan Daendels, Komandan Du Puy, meminta Sultan Banten untuk memenuhi lima tuntutan sebelum 15 November 1808, termasuk mengirimkan 1.000 pekerja setiap hari dan merobohkan keraton Sultan untuk pindah ke Anyer. Ketidakmampuan Sultan Banten untuk memenuhi tuntutan ini mencerminkan betapa berat dan tidak adilnya beban yang dipaksakan oleh Daendels dalam proyek ini, yang berakibat pada penderitaan dan kematian yang masif di kalangan pekerja. (Arifin, 2021)

Kerja paksa yang diberlakukan Daendels terhadap masyarakat pribumi. Sistem kerja paksa yang digagasnya dalam pembuatan jalur ini demi kepentingan pemerintahan Belanda di tanah jajahan menyebabkan kesengsaran bagi pribumi. Banyak dari masyarakat pribumi yang kehilangan nyawa dalam pembuatan jalur ini akibat kelelahan ataupun terkena tebasan. Selain itu adanya wabah penyakit malaria yang kala itu menjadi momok bagi masyarakat pribumi juga menjadi penyebab masyarakat pribumi kehilangan nyawa. pada masa kolonial Belanda, kedudukan kaum pribumi sangat sengsara karena adanya sistem kerja paksa. Indonesia diperlakukan seperti budak di negeri sendiri oleh bangsa "terjajah". Penjahat memperlakukan Indonesia dengan sistem kerja rodi, memanfaatkan tenaga dan harga diri Indonesia hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Selain suka bertindak semena-mena pada masyarakat biasa, Gubernur Jendral Daendels juga tak segan-segan merendahkan strata sosial para raja. Strata sosial menjadi salah satu hal yang harus direbut oleh para menner Belanda untuk tetap bertahan dan mempertahankan kedudukannya di tanah jajahan. Tujuannya, agar pemerintahan kolonial Belanda tetap berkuasa dan masyarakat pribumi mau menuruti setiap perintahnya.

Untuk tetap mempertahankan kedudukannya tersebut, maka pemerintahan Belanda melakukan penindasan terhadap para raja pribumi. Belanda menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada kaum pribumi. Salah satunya ditunjukkan oleh Daendels yang melakukan perbuatan tidak baik ketika ia berjabat tangan dengan raja Jawa. Daendels tidak takut bahkan cenderung merendahkan bangsawan Jawa. Dia suka membalas jabatan tangan dengan tangan kiri. Daendels merupakan gubernur jenderal kolonial Belanda yang tidak hanya kejam tetapi juga sombong. Dalam kekuasaannya Daendels banyak menentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh para raja-raja di Jawa. Salah satu peraturan yang dilanggar oleh Daendels misalnya saja ketika bertemu dengan raja, Daendels tidak ingin melepas topi. Selain itu, Daendels juga ingin duduk di kursi yang derajatnya sama dengan raja. Daendels tidak memiliki rasa menghargai terhadap raja-raja di tanah Jawa. Daendels suka membalas jabatan tangan kanan para raja dengan tangan kiri. Hal ini menandakan bahwa dalam bentuk status sosial pun para pribumi juga mengalami penindasan secara tidak terhormat. Sebagai seorang pemimpin yang seharusnya dihormati oleh rakyat, ia justru diperlakukan rendah atau bahkan hina oleh sikap angkuh Daendels. (Achsani, 2020)

### **Dampak Positif Dan Negatif Dari Kebijakan Daendels**

Daendels memiliki semangat liberal dan patriotisme. Frasa yang berasal dari moto Revolusi Prancis digunakan dalam banyak kuliahnya. Tujuan Daendels adalah untuk menanamkan rasa persaudaraan dan kesetaraan serta rasa kemandirian dalam masyarakat Indonesia. Untuk kepentingan Republik Bataaf, Daendels berusaha menghilangkan praktik feodal dan mengubah masyarakat menjadi kekuatan yang lebih dinamis dan produktif. Selain itu, Daendels mengambil langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membatasi otoritas bupati atas kekuatan dan harta benda rakyat. (Laiya, 2022) Kebijakan Daendels di Jawa memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di bawah pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811), pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang 1.000 km, menjadi proyek besar yang memperlancar transportasi dan memperkuat jalur komunikasi. Selain itu, Daendels juga memperkenalkan reformasi administrasi dan birokrasi yang lebih modern, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kontrol terhadap wilayah jajahan. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat. Pembangunan Jalan Raya Pos dilakukan melalui kerja paksa (*rodi*), di mana ribuan penduduk dipaksa bekerja tanpa upah, sering kali dalam kondisi buruk yang menyebabkan banyak kematian. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja menjadi semakin parah, karena Daendels mendorong peningkatan produksi hasil bumi untuk kepentingan ekspor ke Eropa. Kebijakan pajak yang tinggi serta pengambilan paksa hasil bumi semakin memperberat beban rakyat. Selain itu, kebijakan Daendels mengurangi kekuasaan penguasa lokal, seperti raja dan bupati, yang menimbulkan ketegangan politik di antara elite tradisional. Secara keseluruhan, meski infrastruktur dan birokrasi berkembang, rakyat Jawa mengalami penderitaan besar akibat kerja paksa, eksploitasi, dan penindasan.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) di Jawa yang bersifat eksploitatif, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*). Kebijakan ini dianggap tidak memedulikan aspek kemanusiaan, karena rakyat dipaksa bekerja dengan kondisi yang keras, sering kali tanpa upah yang memadai. Walaupun kebijakan Daendels membawa perubahan signifikan dalam aspek militer dan administrasi, eksploitasinya terhadap rakyat Jawa menghasilkan penderitaan sosial-ekonomi yang besar, sehingga kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk penjajahan yang menindas daripada memperbaiki kondisi rakyat lokal. Kebijakan Daendels, yang bertujuan membangun

infrastruktur besar seperti Jalan Raya Pos, menggunakan tenaga kerja paksa (rodi) dari rakyat lokal, yang dipaksa bekerja tanpa upah dan di bawah kondisi kerja yang keras. Selain itu, tanah rakyat sering kali diambil alih tanpa kompensasi yang adil untuk keperluan militer dan administrasi kolonial. Dampaknya sangat merugikan masyarakat Jawa, yang kehilangan tanah, tenaga, dan mata pencaharian mereka. Secara sosial dan ekonomi, kebijakan ini memperburuk kondisi rakyat lokal, sementara manfaat utamanya hanya dirasakan oleh pemerintah kolonial. Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan eksploitasi besar-besaran yang mengabaikan kemanusiaan demi keuntungan kolonial Belanda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achsani, F. (2020). Masyarakat Pribumi Pada Masa Penjajahan Belanda Dalam Novel Kisah Tanah Jawa Karya Mada Zidan Dan Bonaventura De Genta. *Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 15-28.
- Aman. (2014). *Indonesia: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Yogyakarta: Pujangga Press.
- Arifin, F. (2021). Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811. *JURNAL AGASTYA*, 1-18.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 177-190.
- Damayanti, F., Tsurayya, G., Aman, & Basyari, A. (2023). Herman Willem Daendels Dalam Pusaran Kerja Paksa Pembangunan Jalan Raya pos, Jalan Daendels. *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 30-45.
- Fandy. (2023, juli senin). Pengertian Kerja Rodi: Sejarah, Tujuan, Dan Dampaknya. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/kerja-rodi-adalah/>
- Laiya, L. T. (2022). Kajian Dan Pengaruh Positif Negatif Penjajahan Kolonial Belanda Terhadap Pembentukan Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 1647-1669.
- Prabowo, G., & Nailufar, N. N. (2020, desember Jum'at). Kebijakan Daendels Di Indonesia.
- Raharjo, Y. K. (2024). Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Jawa 1808-1811. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 8-15.
- Sinaga, R., Simangungsong, L. E., & Syafirah. (2020). *Kolonialisme dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.